

KETIMPANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

Nidya Waras Sayekti

Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: nidya.ws@dpr.go.id

Abstract

During 16 years of development since regional autonomy, economic inequality is still a problem in Banten Province. The imbalance of growth between the South and North Region sharpens the socio-economic welfare gap in Banten Province. The districts/municipalities in the Northern Territory have Gross Regional Domestic Income (GRDP) greater than districts / municipalities located in the Southern Region whereas the southern region has an area of more than 60 percent of the total area of Banten. This research used descriptive method with qualitative approach to give a thorough analysis about policy of economic gap equation and development in Banten Province. The gini ratio of Banten Province for the year 2012 - 2016 is the highest in 2014 (0.424) and tends to decrease to 0.392 in 2016. One of the efforts of the Banten Provincial Government is to implement a long-term development strategy by maximizing the potential of the remaining area, the southern part as the minapolitan area. To support this and to reduce economic imbalances, local governments need to increase inter-regional connectivity through improved land, air and sea transportation and the infrastructure linking new growth centers. Through this strategy is expected to suppress the economic imbalances that occur and even distribution of development felt more Banten community.

Keywords: *Economic inequality, growth imbalance, and economic gap equation policy*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen. Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang merata, penyebabnya yaitu fundamentalisme pasar, ketidaksetaraan gender, upah murah, ketimpangan akses infrastruktur antara perdesaan dan perkotaan, serta sistem perpajakan yang gagal dalam mendistribusikan kekayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yaitu melalui kebijakan pemekaran daerah, sehingga pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih mudah terwujud. Pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil studi dari Bappenas (2008) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintahan daerah baru tidak mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan indikator pembangunan sosial dengan wilayah induknya, walaupun sudah berdiri lebih dari lima tahun.

Provinsi Banten merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Pemisahan provinsi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Hingga saat ini, Provinsi Banten telah melakukan pembangunan daerahnya selama 16 tahun. Tercatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2016 sebesar 5,26 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,40 persen (yoy). Perlambatan ini merupakan dampak dari ketidakstabilan perekonomian global yang menyebabkan tekanan pada beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten khususnya industri pengolahan. Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut masih meninggalkan permasalahan pembangunan yaitu ketimpangan ekonomi masyarakat Banten.

Data Kemendagri menunjukkan dari tujuh daerah otonom hasil pemekaran, tingkat kesejahteraan rakyat Banten masuk dalam peringkat keenam, atau terburuk kedua. Dari tujuh provinsi baru yang dimekarkan sejak tahun 1999 itu, nilai tertinggi diperoleh Provinsi Maluku Utara dengan skor 55,88. Selanjutnya secara berurutan sesuai skor hasil evaluasi adalah Provinsi Gorontalo (51,31), Kepulauan Bangka Belitung (49,64), Sulawesi Barat (46,73), Kepulauan Riau (46,64), Provinsi Banten (44,57), dan Papua Barat (24,99). Evaluasi tersebut dinilai dari empat kriteria yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Provinsi Banten menduduki peringkat 6 untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan nilai indeks 18,23, *good governance* menduduki peringkat 5, pelayanan publik menduduki peringkat 3 dengan indeks 12, dan penguatan daya saing menduduki peringkat 5 dengan indeks 7,48.

Berdasarkan data Kemendagri tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara melaksanakan *good governance*, dan meningkatkan daya saing daerahnya. Sedangkan, upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu melalui pengurangan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada September 2016 sebesar 5,36 persen sedangkan angka nasional sekitar 10,70 persen. Tingkat koefisien gini (*gini ratio*) di Provinsi Banten pada tahun 2012 – 2016 berfluktuasi, sedangkan presentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September tahun 2016 sebesar 17,41 persen mengategorikan Provinsi Banten pada ketimpangan rendah. Oleh karena itu,

berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.

1.2. Rumusan Masalah

Mengatasi masalah ketimpangan ekonomi merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi pemerintah. Berbagai kebijakan dan program pembangunan disusun dan dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Banten yang telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di wilayahnya.

Penelitian ini akan mengkaji tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dengan fokus permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten dilihat dari koefisien gini (*gini ratio*)?
- b. Bagaimana kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengkaji ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten berdasarkan koefisien gini (*gini ratio*).
- b. mengkaji kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi.

2. Tinjauan Pustaka - Kesenjangan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah

Masalah kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia sudah ada sejak tahun 1930 dikenali oleh Prof. Boeke dalam bukunya yang berjudul *Dualistische Economie*. Inti dari bukunya adalah bahwa perekonomian Indonesia terdiri atas dua bagian yang tidak terkait antara satu dan lainnya yaitu perekonomian perkotaan dan perekonomian perdesaan, yang ditandai dengan kesenjangan yang sangat luar biasa besarnya. Tidak ada daya tarik atau *pull effect* dari ekonomi perkotaan terhadap ekonomi perdesaan, dan juga tidak ada *trickle down effect* dari ekonomi perkotaan terhadap ekonomi perdesaan. Kondisi seperti ini yang membuat kesenjangan luar biasa antara kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di perkotaan dan perdesaan.

Penyebab dari kesenjangan yang sangat besar ini adalah apabila liberalisme diberlakukan sejauh mungkin, pertumbuhan ekonomi akan besar, tetapi akan disertai dengan kesenjangan antara kaya dan miskin besar pula. Jadi, sistem ekonomi suatu bangsa sangat menentukan tingkat keadilan dari bangsa yang

bersangkutan. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sangat liberal, dalam arti keikutcampuran pemerintah dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi harus sekecil mungkin. Dalam sistem ekonomi demikian, berdampak terhadap pertumbuhan yang relatif besar setiap tahunnya, tetapi disertai kesenjangan yang lebih besar lagi. Dalam bukunya yang berjudul *Capitalism in the 21st Century*, Thomas Piketty menemukan bahwa *return on capital* lebih besar dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) di bagian-bagian dari dunia yang menganut liberalisme yang sejauh mungkin.

Salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat tingkat ketimpangan ekonomi di dalamnya. Semakin besar ketimpangan terjadi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kota/kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam satu negara. Ketimpangan masyarakat ini diukur salah satunya dengan koefisien gini (*gini ratio*) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua kali dalam satu tahun. Koefisien gini (*gini ratio*) adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai koefisien gini (*gini ratio*) berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai koefisien gini (*gini ratio*) menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi dilakukan pemerataan pembangunan antarwilayah. Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan analisis yang menyeluruh mengenai ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten. Kemudian penjelasan deskriptif akan memperdalam analisisnya. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah dan akademisi mengenai pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten, ketimpangan ekonomi yang terjadi dan kebijakan pemerataan pembangunan dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS), literatur (buku-buku referensi, jurnal), dan internet yang mempublikasikan mengenai pembangunan di Provinsi Banten.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Banten Berdasarkan Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, diantaranya Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Secara geografis, wilayah Provinsi Banten sangat strategis yaitu berbatasan dengan Ibukota Negara DKI Jakarta dan merupakan daerah penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun 2011 sebanyak 11.005.518 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.139 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Banten bertumpu di Kabupaten Tangerang yakni sebesar 26,9 persen dan terendah di Kabupaten Cilegon sebesar 3,5 persen. Dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Tangerang sebanyak 12.147 jiwa per km² dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Lebak dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 359 jiwa per km². Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penyebaran penduduk di Provinsi Banten tidak merata, dimana kepadatan tertinggi berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Berdasarkan data Susenas 2016, sebanyak 27,51 persen penduduk Banten berusia muda (0-14 tahun), 69,57 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 2,92 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Banten sebesar 46,14 persen. Artinya bahwa Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan wilayahnya.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Pengawasan (*monitoring*) terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Ketimpangan ekonomi menjadi isu strategis pembangunan Provinsi Banten, yaitu adanya ketidakseimbangan pertumbuhan (*unbalance growth*) antara wilayah Banten Selatan dan wilayah Banten Utara di Provinsi Banten sehingga mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) dan dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Berdasarkan penelitian Suhartono (2015) tentang ketimpangan dan pembangunan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran dengan analisis Klassen data PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Banten, menghasilkan bahwa Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Sedangkan Pandeglang dan Lebak masuk kategori

daerah relatif tertinggal. Kota Cilegon masuk kategori daerah berkembang cepat, dan Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori daerah maju dan lamban tumbuh.

Berdasarkan data BPS, koefisien gini (*gini ratio*) Provinsi Banten masih berfluktuasi dibandingkan koefisien gini (*gini ratio*) nasional. Berikut data koefisien gini (*gini ratio*) Provinsi Banten dan nasional tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Tahun	Provinsi Banten	Nasional
2012	0,381	0,413
2013	0,380	0,406
2014	0,424	0,414
2015	0,386	0,402
2016	0,392	0,394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2017

Berdasarkan data lima tahun terakhir (Tabel 1), tingkat koefisien gini (*gini ratio*) nasional menunjukkan tren menurun. Di sisi lain, tingkat koefisien gini (*gini ratio*) di Provinsi Banten cukup berfluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada 2014 yaitu sebesar 0,424 dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai angka 0,392 pada tahun 2016. Meskipun demikian, secara rata-rata tingkat ketimpangan di Provinsi Banten secara historis sedikit lebih rendah dibandingkan nasional. Koefisien gini (*gini ratio*) Provinsi Banten di tahun 2016 tersebut lebih rendah dibandingkan nasional yang pada September tahun 2016 mencapai 0,394 yang juga menurun dari sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 0,402. Artinya bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten mampu menekan ketimpangan ekonomi yang terjadi diwilayahnya.

Selain koefisien gini (*gini ratio*), ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah presentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya berada di atas 17 persen. Pengukuran ketimpangan ini dilakukan BPS pada bulan Maret dan September setiap tahunnya. Pada September tahun 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,41 persen yang berarti Banten berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase ini turun 0,14 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret tahun 2016 sebesar 17,55 persen.

Penurunan distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September tahun 2016 ini karena diimbangi peningkatan distribusi pengeluaran penduduk 40 persen menengah sebesar 0,74 poin. Ukuran ketimpangan ini mencatat hal yang sama dengan Bank Dunia yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Banten selama tahun 2016 adalah:

- a. Pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami peningkatan sebesar 2,10 persen dan penduduk kelompok 20 persen teratas berkurang sebesar -1,27 persen.
- b. Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tidak dibayar maupun dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2015-2016, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tidak dibayar meningkat sebesar 11,24 persen dan jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja dibayar meningkat cukup tajam yaitu sebesar 66,31 persen. Hal ini sebagai dampak dari lebih pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.2. Kebijakan Pemerataan Pembangunan Dalam Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Banten

Kinerja perekonomian Provinsi Banten selama tahun 2012–2016 berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,6 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Banten cenderung menurun dan memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten walaupun tingkat kemiskinan di perdesaan provinsi ini cukup tinggi.

Penelitian Bank Dunia menemukan tiga elemen kunci dalam menurunkan ketimpangan, yaitu pertama, mengatasi ketimpangan peluang antara anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak dari keluarga mapan; kedua, mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi dalam lapangan kerja; ketiga, mereformasi kebijakan fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara sehingga kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam menurunkan ketimpangan ekonomi.

Kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang. Daerah bagian selatan relatif tertinggal dibandingkan daerah bagian utara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, wilayah Provinsi Banten bagian selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) jauh lebih rendah (masing-masing mencapai Rp3,9 miliar dan Rp3,8 miliar) dibandingkan wilayah bagian utara (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp17 miliar dan Rp27 miliar). Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki luas 63,89 persen dari luas Banten.

Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten. Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolitan DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah Banten bagian selatan.

Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan *spillover* (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang relatif baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp8.459 juta lebih.

Dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi antara wilayah Utara dengan Wilayah Selatan di Provinsi Banten, pemerintah daerah melakukan strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal. Strategi yang tengah dikembangkan, antara lain, dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan minapolitan. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor. Lokasi-lokasi pengembangan minapolitan Banten meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu (Kota Serang), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan (Kabupaten Pandeglang), kawasan budidaya rumput laut Pontang (Kota Serang), dan kawasan budidaya kerang Panimbang serta kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangun. Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai tahun 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan minapolitan di Banten untuk jenis perikanan tangkap.

Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi minapolitan dimaksud. Proyek pengembangan kawasan minapolitan di Banten ini akan menjadi percontohan nasional bagi sektor kelautan dan perikanan. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi.

Dalam melaksanakan pembangunan, tentunya tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi pemerintah daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunannya antara lain:

- a. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

- b. terkait tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan kegiatan dan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa.
- c. Provinsi Banten memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Pengembangan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara informal juga perlu dilakukan.
- d. lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di provinsi, terutama di perdesaan. Tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan menunjukkan kegiatan perekonomian yang *stagnan*, terutama sektor pertanian.

5. Penutup

Provinsi Banten mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan baik selama periode tahun 2012–2016. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut telah mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, pencapaian pertumbuhan tersebut belum diikuti dengan perbaikan dalam tingkat ketimpangan di Provinsi Banten. Tingkat koefisien gini (*gini ratio*) di Provinsi Banten cukup berfluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,424 dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai angka 0,392 pada tahun 2016.

Berbagai hambatan dan tantangan harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten. Salah satu yang menjadi hambatan yaitu kondisi geografis. Provinsi Banten secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Pembangunan di wilayah utara cenderung lebih maju dibandingkan wilayah selatan sehingga menyebabkan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Banten menerapkan strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal, antara lain dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan minapolitan.

Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk menekan ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten yaitu dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Daftar Pustaka

BPS Provinsi Banten, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th.XI, 6 Februari 2017.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten, (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/banten/Documents/Kajian%20Ekonomi%20dan%20Keuangan%20R>

egional%20Provinsi%20Banten%20Februari%202017.pdf, diunduh 4 April 2017), hal. 101.

Kesejahteraan Banten Terburuk Kedua dari Tujuh Provinsi, (<http://www.kemendagri.go.id/news/2012/10/05/kesejahteraan-banten-terburuk-kedua-dari-tujuh-provinsi>, diunduh 12 Juni 2017).

Ketimpangan di Indonesia Duduki Peringkat Keenam Terburuk di Dunia, (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/23/131342526/ketimpangan.di.indonesia.duduki.peringkat.keenam.terburuk.di.dunia>, diunduh 12 Juni 2017).

Kwik Kian Gie. 2002. Kesenjangan Sosial Ekonomi. Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Minapolitan: Strategi Pemerataan Pembangunan Banten, http://www.kompasiana.com/www.ratuatutchosiyah.com/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten_5500de4aa333115b7351219f, diunduh 17 April 2017.

Narasi Renstra Bappeda Banten tahun 2012-2017, <http://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/rencana-strategis.html>, diunduh 4 April 2017).

Profil Pembangunan Banten, <http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203600Banten%202013.pdf>, diunduh 21 Mei 2017.

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Banten 2015, (http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/06.%20Analisis%20Provinsi%20Banten%202015_ok.pdf, diunduh 18 April 2017).

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2016, https://banten.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Statistik-Kesejahteraan-Rakyat-Provinsi-Banten-2016.pdf, diunduh 5 Mei 2017.

Statistik Kesejahteraan rakyat Provinsi Banten 2016, https://banten.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Statistik-Kesejahteraan-Rakyat-Provinsi-Banten-2016.pdf, diunduh 5 Mei 2017.

Stimson, Robert Stough, Roger dan Robert Brown. 2002. Regional Economics Development: Analysis and Planning Strategy Berlin: Springer Verlag,

Suhartono. 2015. Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, JEKP Vol. 6 No. 1, Juni 2015.

UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pempentukan Propinsi Banten.

Vivi Alatas. 2017. Mengatasi Ketimpangan di Indonesia, Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.